

Collaborative Governance Melalui Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Sukorambi Tahun 2024

Zhurriyyatin Inayah¹, Itok Wicaksono²

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received April, 2025

Revised April, 2025

Accepted April, 2025

Available online April, 2025

inayahzuhri02@gmail.com,
itokwicaksono@unmuhjember.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Mengacu pada kerangka teori Ansell dan Gash, pendekatan ini menekankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani masalah stunting secara terintegrasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deksriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai koordinator kebijakan, serta keterlibatan sektor swasta seperti Mora Group melalui program CSR dan Koramil Sukorambi melalui program Bapak Asuh Anak Stunting, mampu mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan efektivitas intervensi gizi. Proses kolaboratif diwarnai dengan dialog tatap muka, komitmen bersama, dan upaya membangun kepercayaan antar aktor. Meski terdapat tantangan dalam kesetaraan partisipasi dan integrasi program, pendekatan ini berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 19% menjadi 6%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Process; Stunting; Kolaborasi Lintas Sektor*

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the collaborative governance model in accelerating stunting reduction in Sukorambi District, Jember Regency. Referring to the theoretical framework of Ansell and Gash, this approach emphasizes cross-sectoral collaboration between the government, the private sector, and the community in addressing stunting problems in an integrated manner. This research was carried out with a qualitative descriptive approach using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the establishment of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) as a policy coordinator, as well as the involvement of the private sector such as Mora Group through the CSR program and Koramil Sukorambi through the

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com

Stunting Child Foster Father program, are able to overcome budget limitations and increase the effectiveness of nutrition interventions. The collaborative process is colored by face-to-face dialogue, mutual commitment, and efforts to build trust between actors. Despite the challenges in equal participation and program integration, this approach has succeeded in reducing the prevalence of stunting from 19% to 6%. This study concludes that collaborative governance can be an effective strategy in addressing complex public health problems in a participatory, inclusive, and sustainable manner.

Keywords: *Collaborative Governance; Stunting; Cross-Sector Collaboration*

1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang masih menjadi perhatian besar di Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi pertumbuhan terhambat pada balita yang disebabkan kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Anak dikatakan stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh World Health Organization (UNICEF, WHO, & World Bank Group, 2019). Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan prevalensi stunting yang tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, Jember memiliki angka stunting tertinggi di provinsi tersebut, dengan prevalensi mencapai 34,9% (Solichah, 2024). Pada tingkat daerah, Kecamatan Sukorambi di Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah dengan tingkat stunting yang menjadi perhatian serius. Tingginya prevalensi stunting di Kecamatan Sukorambi menjadikannya prioritas dalam upaya intervensi kesehatan, terutama dalam hal peningkatan gizi dan pencegahan kekurangan nutrisi pada anak-anak.

Faktor-faktor penyebab stunting di Sukorambi meliputi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, kurangnya edukasi terkait pola asuh dan kesehatan ibu dan anak. Faktor ekonomi juga berperan penting dalam tingginya angka stunting di Sukorambi. Sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Sukorambi masih berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini berpengaruh terhadap keterbatasan kemampuan mereka untuk menyediakan makanan bergizi dan memanfaatkan layanan kesehatan dengan optimal. Selain itu, kondisi lingkungan dan sanitasi yang buruk juga turut memperburuk masalah ini, sebab anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang kurang sehat sangat rentan terhadap infeksi yang bisa menghambat penyerapan nutrisi (Fadillah, Pramesti, & Qudsi, 2024).

Adanya Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi merupakan komitmen dan upaya pemerintah dalam mengurangi prevalensi stunting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mempercepat upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan yang terkoordinasi dan menyeluruh di tingkat daerah. Pendekatan terintegrasi yang dimaksud bahwa upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara terintegrasi yakni melibatkan lintas sektor yang meliputi pemerintah, lembaga kesehatan, pendidikan dan masyarakat. Peraturan ini juga membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung upaya percepatan pencegahan stunting baik melalui dukungan finansial, keterlibatan dalam program-program sosial maupun penyediaan fasilitas penunjang.

Melalui adanya kebijakan tersebut, pemerintah Kecamatan Sukorambi membuat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari Camat, seluruh stakeholder kecamatan, Muspika, staff PL KB Sukorambi dan PKK Kecamatan.

TPPS bertujuan untuk mengkoordinir percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi. Pihak TPPS memahami bahwa upaya penanggulangan stunting membutuhkan kolaborasi antar sektor dan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan (Nisa, 2018). Dengan demikian, penyelesaian masalah stunting di Kecamatan Sukorambi memerlukan upaya bersama dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kecamatan. Pasti pemerintah Kecamatan Sukorambi memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk bersama-sama menuntaskan masalah stunting yang tak kunjung usai tersebut. Pengentasan stunting perlu dilaksanakan secara konvergen yaitu melalui tindakan terpadu dan terkoordinasi antar program, baik dalam bentuk pengembangan fisik infrastruktur Kesehatan maupun program pemberdayaan dan edukasi masyarakat di bidang kesehatan (Saufi, 2021). Dengan demikian, Pemerintah Kecamatan Sukorambi mengambil langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan melibatkan pihak swasta.

Pemerintah Kecamatan Sukorambi berkolaborasi dengan pihak swasta yaitu Mora Group melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat menggambarkan bahwa Kecamatan Sukorambi berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung upaya penurunan stunting secara berkelanjutan sejalan dengan target pembangunan daerah. Kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kecamatan Sukorambi, sektor swasta dan masyarakat mencerminkan model *collaborative governance* sebagaimana yang dipaparkan oleh Ansell dan Gash. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pendekatan *collaborative governance* mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang bertujuan mewujudkan manfaat bagi semua pihak sesuai dengan nilai-nilai normatif (Wicaksono I., 2021). Pada konteks ini, pemerintah berperan sebagai penggerak utama untuk menginisiasi kolaborasi lintas sektor, sedangkan sektor swasta memberikan dukungan berupa sumber daya dan kontribusi makanan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara masyarakat, sebagai penerima manfaat langsung dilibatkan untuk memastikan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pembahasan pada model *collaborative governance* dengan mengangkat judul “Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Sukorambi”.

TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Istilah *collaborative governance* adalah pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang secara langsung melibatkan aktor non pemerintah atau pihak luar. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian konsensus melalui proses musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif, baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan dan program publik (Ansell & Gash, 2008). Pendapat Ansell dan Gash menunjukkan sebuah gagasan bahwa ada hubungan antara organisasi swasta dan pemerintah sebagai aktor publik dalam administrasi pemerintahan. Pemerintah selaku pihak publik dan sektor swasta sebagai pihak privat merupakan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufi@gmail.com

mitra yang saling melengkapi yang bekerja bersama untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Ansell & Gash, 2008).

Konsep dan definisi *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) sering menjadi rujukan bagi akademisi lain dalam menganalisis model tata kelola kolaboratif. Salah satu akademisi (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) memperluas penjelasan ini dengan menggambarkannya sebagai proses dan tatanan dalam pembuatan keputusan kebijakan public dan pengelolaan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat yang konstruktif melalui kolaborasi antar sektor publik. Lembaga publik tersebut pastinya meliputi pemerintah, sektor privat, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin diraih tanpa adanya sinergi.

Berdasarkan buku dari (Astuti, Warsono, & Rachim, Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik, 2020), isu dan kebijakan publik merupakan penekanan utama dari *collaborative governance*. Institusi publik memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, sedangkan focus utama dan tahapan kolaborasi adalah untuk mewujudkan persetujuan di antara seluruh pemangku kepentingan. Mewujudkan keadilan sosial diperlukan agar pendekatan *collaborative governance* dapat melayani kepentingan publik. Dengan kata lain, kolaborasi mewujudkan sinergi antara sedikitnya dua pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya bersama yang kompleks jika ditangani secara terpisah.

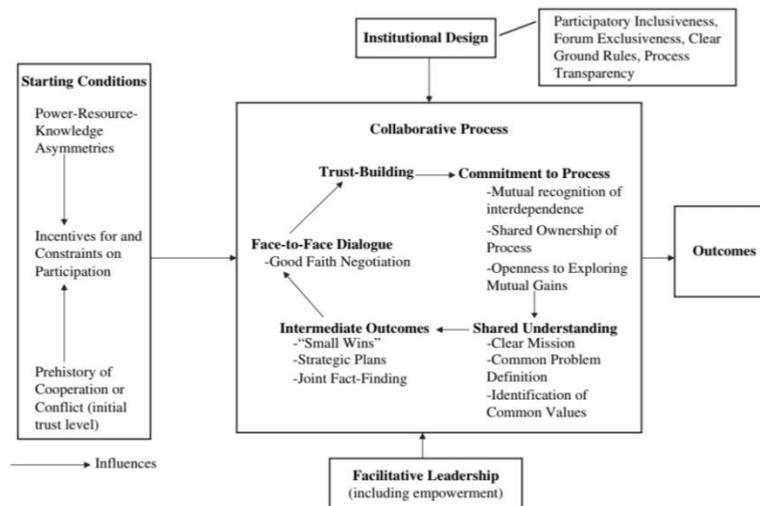
Selain itu, menurut Eppel dalam (Sudarmo, 2011), menggambarkan bahwa *collaborative governance* merupakan kombinasi dua konsep yaitu *collaboration* dan *governance*. *Collaboration* atau kolaborasi berarti bersama-sama bekerja, menjalankan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang melampaui batas-batas hubungan multi sektor dan dalam menjalankan kerja sama tersebut didasarkan pada nilai timbal balik. Sedangkan *governance* berarti proses *steering* yang mempengaruhi segala keputusan dan tindakan dalam sektor privat, publik dan sipil. Sejalan dengan pendapat Keast dan Myrna Mandell dalam (Noor, Suaedi, & Mardiyanta, 2022) bahwa *collaborative governance* mencerminkan bentuk kolaborasi yang lebih erat, dimana setiap pihak saling bergantung, bekerja sama menciptakan ide dan membangun sinergi untuk menemukan solusi baru. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemerintah memiliki andil dalam tata kelola (*governance*), namun ia bukan satu-satunya pemain, sehingga *governance* tidak hanya bekerja secara top down tetapi juga *button up, outside in dan inside out*.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai *collaborative governance*, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah suatu bentuk kerja sama antara berbagai aktor yang meliputi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil untuk mengelola sumber daya bersama, menyelesaikan masalah publik, dan mencapai tujuan yang lebih besar yang sulit dicapai jika dilakukan secara terpisah oleh satu pihak saja. Secara garis besar dibandingkan privetisasi dan regulasi yang selama ini dipakai pemerintah, *collaborative governance* menawarkan cara tata kelola yang baru untuk menghadapi berbagai tantangan.

Pada dasarnya, desain tata kelola kolaboratif adalah sebuah strategi untuk membuat keputusan. Sejalan dengan pendapat Ansell dan Gash sebelumnya bahwa *collaborative governance* sebagai suatu pendekatan untuk merumuskan kebijakan publik yang dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, Ansell dan Gash juga mengemukakan bahwa pemerintah,

masyarakat, sektor swasta, lembaga non pemerintah serta para cendekiawan dari perguruan tinggi merupakan pelaku-pelaku utama dalam kolaborasi melalui *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008). Berikut model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash:

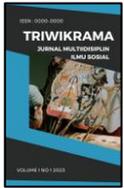
Gambar Model *Collaborative Governance* Oleh Ansell and Gash



Sumber : *Journal Collaborative Governance* (Gash, 2008)

Mengacu pada model kerangka kerja yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash tentang proses *collaborative governance* terdiri atas empat tahap yaitu:

1. **Starting Condition (Kondisi Awal)**, merupakan tahapan dalam menjelaskan bahwa sebelum memulai proses kolaborasi penting untuk memastikan keseimbangan sumber daya dan kekuatan antar pemangku kepentingan (stakeholders). Jika terjadi ketidakseimbangan perlu ada komitmen untuk mendukung pihak yang lebih lemah agar tidak dimanipulasi. Selain itu, insentif diperlukan untuk mereka aktif berpartisipasi. Agar tidak terjadi konflik, maka perlu untuk membangun rasa saling percaya sejak awal.
2. **Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)**, menurut Ansell dan Gash menyatakan bahwa satu tahapan penting dalam proses kolaborasi adalah adanya fungsi kepemimpinan di antara para aktor. Hal ini diperlukan untuk menjaga hubungan agar tetap stabil, menjaga kepercayaan aktor, memastikan tidak ada yang dirugikan dan membangun forum-forum untuk diskusi. Dengan demikian, kolaborasi dapat diberdayakan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan si setiap langkahnya.
3. **Institusional Design (Desain Institusional)**, aspek terpenting dalam prosedur dan pedoman dasar untuk kolaborasi yang dilakukan secara kritis adalah legitimasi procedural di sepanjang proses kolaborasi. Dalam hal ini, penting untuk ditegaskan bahwa pemerintah harus transparan dan inklusif selama proses kemitraan.
4. **Collaborative Process (Proses Kolaborasi)**, serangkaian tahapan dan interaksi di antara berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama melalui kerja sama lintas sektor. Tahapan membentuk kolaborasi terdiri dari lima komponen, yaitu:



- a. *Face to face* (dialog tatap muka) menjadi langkah awal dalam proses kolaboratif antara para pemangku kepentingan, dimana diskusi yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan. Proses ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- b. *Trust building* (membangun kepercayaan) merupakan proses tahap kedua yang tidak terpisahkan dari dialog tatap muka. Pada tahap ini, para pemangku kepentingan dituntut untuk membangun kepercayaan dalam proses jangka panjang dengan komitmen yang kuat dan konsisten.
- c. *Commitment to process* (komitmen menjadi proses) merupakan tahapan ketiga dari proses kolaborasi. Adanya komitmen antara pemangku kepentingan sangat penting dan perlu ditekankan karena dalam proses kolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali melainkan kesepakatan yang terus berlanjut.
- d. *Shared understanding* (pemahaman bersama), pada tahap ini membutuhkan pemahaman bersama diantara para pemangku kepentingan yang mencakup kesepakatan mengenai tujuan yang ingin dicapai, identifikasi masalah yang dihadapi secara kolektif, serta kesamaan pandangan terhadap nilai-nilai yang akan diwujudkan.
- e. *Intermediate outcomes* (hasil antara) menjadi tahapan terakhir dalam proses kolaborasi. Pada tahap ini ialah hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi yang dapat dirasakan secara nyata meskipun tidak seberapa atau bisa disebut dengan hasil kecil (*small win*).

Hasil atau *Outcomes* dalam *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) dalam (Noor, Suaedi, & Mardiyanta, 2022) merujuk pada hasil akhir yang dicapai dari proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil ini mencerminkan sejauh mana tujuan utama kolaborasi berhasil diwujudkan dan sering kali mencakup solusi yang inovatif, kebijakan yang lebih efektif, atau peningkatan kualitas layanan publik. *Outcomes* mencakup manfaat nyata yang dirasakan oleh para pihak, seperti peningkatan efisiensi, legitimasi kebijakan yang lebih tinggi, dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap hasil keputusan. Selain itu, *outcomes* juga sering kali melibatkan dampak jangka panjang, seperti penguatan hubungan antar organisasi atau masyarakat serta peningkatan kapasitas untuk mengelola masalah yang kompleks secara kolaboratif di masa depan (Ansell & Gash, 2008). Hasil ini menjadi indikator keberhasilan proses *collaborative governance* dalam menghasilkan solusi yang inklusif, berkelanjutan serta disetujui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena social yang terjadi secara alami dalam kehidupan masyarakat. Menurut (Abdussamad, 2021), pendekatan kualitatif menekankan pada proses observasi terhadap gejala yang muncul di lingkungan nyata, tanpa adanya manipulasi atau rekayasa dari peneliti. Pendekatan ini bersifat naturalistik dan memprioritaskan konteks social sebagai sumber utama data. Penelitian deskriptif kualitatif tidak hanya menyajikan data secara naratif, tetapi juga berupaya menginterpretasikan makna dibalik fakta-fakta yang ditemukan. Dalam prosesnya, peneliti dituntut memiliki kepekaan, ketelitian,

serta kemampuan analisis yang tinggi untuk menggali makna yang autentik dari fenomena yang diteliti. Hal ini selaras dengan apa yang diutarakan (Nasution, 2023), peneliti perlu melakukan proses reduksi dan pemurnian data secara cermat agar mampu mengungkap makna yang sesungguhnya dari realitas sosial yang diamati. Oleh karena itu, validitas hasil dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada ketajaman analisis dan kedalaman interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh.

Jenis dan Sumber Data

Salah satu jenis pendekatan kualitatif adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada penggambaran dan pemaknaan fenomena secara mendalam berdasarkan data empiris yang dikumpulkan di lapangan. Menurut (Moleong, 2010), penggunaan deskripsi kata-kata, kalimat serta perilaku yang diamati merupakan bagian penting dari sumber data dalam penelitian jenis deskriptif kualitatif. Selain data utama yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga memperkuat analisisnya dengan data tambahan berupa dokumen resmi, laporan, arsip serta bahan-bahan lain yang dianggap relevan dengan fokus kajian.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik seperti wawancara mendalam dan observasi lapangan. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive, yakni mereka yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam terkait objek yang diteliti. Data yang diperoleh dari interaksi langsung ini penting sebagai sumber informasi otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sementara itu, data sekunder didapatkan dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, artikel ilmiah, laporan, jurnal serta sumber daring lainnya. Studi literatur dari berbagai media tersebut digunakan untuk memperkaya perspektif, memperkuat analisis, dan memberikan konteks teoritis yang mendukung temuan lapangan. Informasi mengenai tata kelola kolaboratif banyak tersedia dan mudah diakses melalui internet, sehingga menjadikannya sumber data sekunder yang sangat membantu dalam proses penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada berbagai metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik ini bersifat abstrak tidak terwujud secara fisik, namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara praktis (Arikunto, 2002). Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan terpercaya, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan metode berikut,

Wawancara, menurut (Moleong, 2010), wawancara ialah bentuk komunikasi atau percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interviewee). Pada penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara terstruktur, yaitu dengan Menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Observasi, teknik observasi memungkinkan peneliti untuk menyaksikan dan mencatat secara langsung berbagai peristiwa atau perilaku yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, observasi menjadi alat utama untuk menggali dan memahami dinamika yang terjadi di lingkungan penelitian. Oleh karena

itu, observasi langsung di lapangan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang nyata mengenai kondisi yang diteliti.

Dokumentasi, metode dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, dokumen resmi, majalah, peraturan, dan lain sebagainya (Arikunto, 2002). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari perspektif yang mungkin tidak terjangkau melalui wawancara atau obeservasi, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang bersifat administratif guna memperkaya peahaman terhadap fenomena yang sedang dikaji.

Analisi Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Interpretasi data adalah tindakan perolehan data dengan tujuan digunakan untuk mengatasi permasalahan penelitian atau proses memadatkan data ke dalam format yang lebih sederhana untuk dipahami. Informasi yang dikumpulkan peneliti dari wawancara, observasi dan dokumentasi harus diperiksa secara tepat dan cermat. Setelah data lapangan dibuat, dan menarik kesimpulan hingga informasi tersebut cukup sederhana untuk dimengerti oarang lain maupun diri sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember merupakan pendekatan yang menekankan sinergi antar sektor yang mencakup swasta, pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan stunting secara mendalam. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa permasalahan kesehatan masyarakat khususnya penanganan stunting tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan oleh satu pihak melainkan memerlukan sinergi antara berbagai aktor yang memiliki peran dan sumber daya masing-masing. Model ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) yang menekankan bahwa pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mencapai tujuan bersama secara efektif. Pada konteks ini, collaborative governance berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih erat antar aktor dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi.

Pendekatan collaborative governance sangat relevan untuk mengakselerasi penurunan angka stunting di Kecamatan Sukorambi, dimana sinergi antara berbagai pihak sebagai kunci keberhasilan. Kolaborasi yang erat antar pemangku kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan berperan sebagai penggerak utama dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan berbagai program, serta memastikan implementasi strategi yang telah dirancang. Sementara itu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam memberikan pendampingan langsung kepada keluarga berisiko stunting, mengedukasi masyarakat, serta memantau perkembangan anak-anak yang membutuhkan intervensi. Kolaborasi ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif, pembagian tugas yang jelas, serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung seluruh program stunting. Pada jurnalnya yang berjudul *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Ansell dan Gash merumuskan model

collaborative governance berdasarkan kajian literatur yang mencakup empat dimensi utama yaitu,

Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Sebelum terjalannya kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi, kondisi awal yang melatarbelakangi terbentuknya kerja sama adalah tingginya angka stunting yang mencapai 19%. Tingginya prevalensi ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan lingkungan yang kurang mendukung. Kondisi ini menuntut adanya langkah strategis dan cepat melalui pendekatan kolaboratif dari berbagai pihak. Camat Sukorambi, Asrah Joyo, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting, karena tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, dibentuk sinergi antara TPPS Kecamatan Sukorambi, Tim Pendamping Keluarga (TPK), tenaga kesehatan, Muspika, serta sektor swasta. Tujuannya adalah menciptakan intervensi yang efektif dan terintegrasi.

Selain masalah gizi, keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program seperti pemberian makanan tambahan (PMT), one day one egg, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Dana yang tersedia dari kecamatan dan desa seringkali tidak mencukupi, menyebabkan sebagian program tidak berjalan optimal. Demi mengatasi masalah ini, TPPS menjalin kerja sama dengan Mora Group melalui program CSR. Mora Group memberikan dukungan pendanaan berupa susu formula, telur, dan asupan gizi tambahan wanita hamil dan balita berisiko stunting. Bantuan ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan nutrisi kelompok sasaran terpenuhi, sehingga menunjang tumbuh kembang mereka secara optimal.

Di sisi lain, TPPS juga menjalin kerja sama dengan Koramil Sukorambi melalui program Bapak Asuh Anak Stunting. Sebagai bapak asuh, para Babinsa tidak hanya menjalankan peran simbolis tetapi juga terlibat langsung dalam pemberian dukungan nyata kepada anak-anak asuhnya. Mereka secara rutin memberikan bantuan berupa susu, vitamin, telur dan bahan makanan bergizi lainnya. Selain itu, para Babinsa juga aktif melakukan pendampingan dan pemantauan perkembangan anak dengan kader TPK. Inisiatif ini menunjukkan kontribusi nyata dari Babinsa dalam menjaga kesehatan generasi penerus.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah. Keterlibatan sektor swasta dan lembaga lainnya terbukti memperkuat efektivitas program. Selain itu, keterlibatan aktif dan komitmen kuat dari semua pihak menciptakan sinergi yang positif. Mengacu pada teori Ansell dan Gash, kepercayaan antar pemangku kepentingan menjadi dasar utama terciptanya kolaborasi yang solid. Kepercayaan dibangun melalui transparansi, komunikasi efektif, dan komitmen bersama. Rapat koordinasi rutin TPPS menjaga keterbukaan informasi dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Dengan dukungan lintas sektor dan strategi yang tepat, target zero stunting di Kecamatan Sukorambi bukan sekadar harapan, tetapi sesuatu yang dapat diwujudkan.

Institutional Design (*Desain Kelembagaan*)

Pada pendekatan *collaborative governance*, desain kelembagaan menjadi elemen kunci untuk menjamin keberhasilan kolaborasi antarpemangku kepentingan

dalam kebijakan publik, termasuk dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi. Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), struktur kelembagaan harus mencakup aturan main, mekanisme koordinasi, serta pembagian peran yang jelas antar aktor. Desain kelembagaan di Sukorambi dibentuk melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin oleh camat, dengan melibatkan stakeholder kecamatan, perwakilan DP3AKB dari Balai KB, tenaga kesehatan, TPK, serta mitra swasta seperti Mora Group. TPPS bertindak sebagai koordinator utama dalam menyinergikan seluruh program dan pelaksanaan intervensi stunting. Peran TPPS meliputi penyelarasan program, distribusi tugas, integrasi sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala.

Sebagai implementasi dari prinsip tanggung jawab bersama (*shared responsibility*), TPPS mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Program tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memberdayakan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa-desa, yang menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, pemantauan, dan pendampingan langsung kepada ibu hamil dan balita berisiko stunting. Koordinasi kelembagaan dilakukan melalui forum Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) yang diadakan secara rutin. Camat berperan aktif sebagai pemimpin dan penggerak kolaborasi, termasuk menjalin komunikasi dengan pihak swasta seperti Mora Group dalam mendukung program melalui skema CSR. Dalam forum ini, strategi, evaluasi, serta pengarahan kepada kader TPK dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Keterlibatan unsur Muspika juga penting, terutama dalam distribusi bantuan intervensi seperti program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan One Day One Egg. Sementara itu, Mora Group berkontribusi dalam penyediaan makanan bergizi seperti susu, telur, vitamin, dan biskuit, untuk menutup keterbatasan anggaran dari pemerintah kecamatan dan desa. Melalui desain kelembagaan yang terstruktur, inklusif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, upaya percepatan penurunan stunting di Sukorambi diharapkan dapat lebih terarah, terukur, dan efektif. Model kelembagaan ini juga berpotensi menjadi contoh bagi wilayah lain dalam implementasi kebijakan stunting secara nasional.

Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Dalam model *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan fasilitatif menjadi elemen kunci keberhasilan kolaborasi. Pemimpin dalam model ini berperan sebagai fasilitator, bukan otoriter, dengan mendorong komunikasi terbuka, membangun kepercayaan, dan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Di Kecamatan Sukorambi, kepemimpinan fasilitatif terbukti efektif dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan melibatkan TPPS, TPK, Muspika, dan sektor swasta. Camat Sukorambi memegang peran sentral sebagai pemimpin fasilitatif dengan mengoordinasikan forum Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Forum ini digunakan untuk menyelaraskan visi, strategi, dan intervensi antar pemangku kepentingan. Selain itu, TPPS secara aktif membimbing kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui pengarahan dan pelatihan rutin, agar mereka mampu melakukan edukasi serta pendampingan kepada keluarga berisiko stunting secara efektif.

Kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dalam upaya membangun kolaborasi dengan sektor swasta. Misalnya, kerja sama dengan Mora Group melalui program CSR

yang menyediakan bantuan pangan bergizi seperti susu dan telur untuk mendukung program pemberian makanan tambahan dan *one day one egg*. Keberhasilan kolaborasi ini tidak terlepas dari peran TPPS dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan perusahaan, serta memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran. Pemerintah kecamatan juga menjamin transparansi dan akuntabilitas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) rutin. Evaluasi ini memungkinkan penyesuaian strategi dan memperkuat kepercayaan antar aktor. Di sisi lain, keterbatasan anggaran diatasi melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk Muspika dan TNI.

Program Bapak Asuh Anak Stunting yang melibatkan Koramil menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor. Setiap Babinsa mendampingi satu balita stunting secara langsung, mencerminkan sinergi antara militer dan masyarakat. Secara keseluruhan, kepemimpinan fasilitatif di Sukorambi berhasil menurunkan angka stunting dari 19% menjadi 6%. Pendekatan ini menunjukkan efektivitas collaborative governance dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Dimensi *collaborative process* merupakan inti dari model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash. Keberhasilan kolaborasi bergantung pada kualitas interaksi antar aktor melalui empat elemen utama yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, dan *shared understanding*. Keempat elemen ini menjadi fondasi penting dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi. Proses kolaboratif di Sukorambi melibatkan TPPS, Muspika, kader TPK, dan sektor swasta seperti Mora Group. Interaksi langsung antar pihak difasilitasi melalui forum Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) yang rutin digelar setiap bulan. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk menyamakan persepsi, memecahkan masalah, dan merumuskan kebijakan bersama. Meskipun sudah terbentuk ruang dialog, belum semua aktor merasa proses komunikasi bersifat dua arah. TPPS menganggap forum masih top-down dengan dominasi pemerintah, yang berpotensi menghambat terbentuknya kepercayaan antarpihak.

Membangun Kepercayaan (*trust building*) memerlukan interaksi berulang yang konsisten dan komitmen jangka panjang. Namun, kader TPK masih berperan terbatas sebagai pelaksana teknis, dan belum dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan perlunya ruang partisipasi yang lebih inklusif agar semua pihak merasa dihargai dan setara. Kemudian, pada elemen komitmen terhadap proses (*commitment to the process*) terlihat dari keberlanjutan program seperti PMT, *one day one egg*, pendampingan, kunjungan rumah, dan Bapak Asuh Anak Stunting. Namun, tantangan muncul dari keterlibatan sektor swasta yang masih sporadis dan kurang terintegrasi ke dalam rencana jangka panjang. Untuk menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan, perlu ditumbuhkan kesadaran kolektif bahwa stunting adalah isu lintas sektor yang memerlukan kontribusi aktif seluruh pihak, termasuk masyarakat sipil dan dunia pendidikan.

Elemen terakhir yaitu *shared understanding*, masih menjadi tantangan. Meskipun telah dilakukan forum koordinasi, perbedaan latar belakang institusi dan tingkat pemahaman menyebabkan tidak semua aktor memiliki kesamaan pandangan

terhadap isu stunting. Untuk itu, dibutuhkan proses *joint learning* melalui pelatihan lintas sektor, workshop, dan pendampingan berbasis komunitas untuk menyatukan pemahaman. Secara keseluruhan, implementasi *collaborative process* di Sukorambi telah berjalan meskipun belum optimal. Keempat elemen utama telah mulai dijalankan dan menjadi modal penting menuju kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya penurunan stunting.

Pada bagian *intermediate outcomes* atau hasil sementara dalam proses kolaborasi merupakan hasil-hasil sementara yang muncul sebelum tujuan akhir tercapai. Dalam perspektif *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008), *intermediate outcomes* berperan penting dalam memperkuat kepercayaan antar aktor, membangun komitmen, serta menciptakan legitimasi terhadap proses kolaborasi itu sendiri. Dalam konteks percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi, *intermediate outcomes* dapat dilihat melalui berbagai capaian yang telah diperoleh sebelum mencapai tujuan akhir yaitu *zero stunting*.

Interaksi dan koordinasi yang efektif dalam proses kolaborasi menghasilkan *intermediate outcomes* dalam bentuk peningkatan kapasitas dan sinergi antar aktor. Kolaborasi antara TPPS Kecamatan, TPK, serta Muspika maupun sektor swasta menunjukkan bahwa masing-masing pihak tidak hanya menjalankan perannya secara individual, tetapi juga saling mendukung untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan adanya kolaborasi yang kuat dan terstruktur, program yang dijalankan tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul, tetapi juga mampu mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Hasilnya, selain peningkatan kapasitas setiap aktor dalam menjalankan perannya, juga tercipta ekosistem kerja sama yang lebih solid dan efektif dalam mendukung pencapaian target program secara menyeluruh.

Tidak hanya itu hasil sementara yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu adanya penurunan angka prevalensi stunting di Kecamatan Sukorambi. Awalnya angka stunting di Kecamatan Sukorambi mencapai 19%, namun berkat adanya upaya kolaborasi dan implementasi berbagai intervensi yang tepat sasaran, angka tersebut berhasil mengalami penurunan drastis hingga mencapai 6%. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan dampak yang nyata meskipun tujuan akhir masih dalam proses pencapaian. Kolaborasi yang dibangun tidak hanya sebatas koordinasi administratif, tetapi juga melibatkan aksi nyata di lapangan. Keberhasilan ini juga meningkatkan legitimasi program, dimana masyarakat serta pemangku kepentingan semakin percaya bahwa pendekatan kolaboratif dapat memberikan solusi yang efektif dalam penanganan stunting.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis, penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan *collaborative governance* terbukti efektif dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan stunting yang kompleks. Model ini dijalankan dengan mengacu pada kerangka kerja Ansell dan Gash yang mencakup empat dimensi utama yaitu, kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses

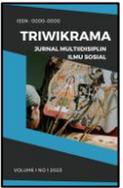
kolaboratif. Tingginya angka stunting di Sukorambi yang mencapai 19% menjadi latar belakang penting terbentuknya sinergi antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), TPK, Muspika, serta Mora Group dari sektor swasta. Program intervensi seperti PMT, One Day One Egg, dan Bapak Asuh Anak Stunting menjadi bentuk nyata dari aksi kolaboratif di lapangan. Peran camat sebagai pemimpin fasilitatif berperan besar dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, menjaga komunikasi terbuka, dan memastikan partisipasi aktif semua pihak. Selain itu, TPPS secara aktif membina kader TPK dan mengadakan forum Rakorcam untuk menyelaraskan strategi lintas sektor. Keberadaan Mora Group melalui program CSR juga membantu menutupi kekurangan anggaran dengan kontribusi nyata berupa pangan bergizi. Secara keseluruhan, model *collaborative governance* di Sukorambi berhasil menurunkan angka stunting dari 19% menjadi 6%. Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terstruktur dan partisipatif dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi model praktik baik bagi daerah lain.

Saran

- a. Pemerintah Kecamatan Sukorambi dapat memperkuat forum Rakorcam dengan melibatkan lebih banyak aktor seperti akademisi dan LSM untuk memberikan kontribusi konkret dalam bentuk pendampingan, riset, serta inovasi program berbasis data dan kebutuhan lokal.
- b. Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) perlu mendapatkan pelatihan rutin yang dibimbing langsung oleh tenaga ahli di bidang kesehatan guna meningkatkan efektivitas pendampingan dalam percepatan penurunan stunting.
- c. Pemerintah Kecamatan Sukorambi harus memperluas jejaring kemitraan dengan sektor swasta, karena saat ini partisipasi sektor swasta dalam program percepatan penurunan stunting masih bersifat tidak konsisten dan belum menjadi bagian dari kerangka kerja kolaboratif yang berkelanjutan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian KUALITATIF*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.



- Fadillah, A. P., Pramesti, H. A., & Qudsi, R. H. (2024). Stunting dan Ketahanan Keluarga, Desa Giripawana Kec. Mandalawangi, Pandeglang Banten. *Pemberdayaan Masyarakat: Jurnal Aksi Sosial*, 43-58.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Harfa Creative.
- Nisa, L. S. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 173-179.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
- Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *In Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 80-95.
- Solichah, Z. (2024, Juli 2). *Komitmen Pemkab Jember Cegah Stunting dari Hulu Hingga Hilir*. Diambil kembali dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/4177272/komitmen-pemkab-jember-cegah-stunting-dari-hulu-hingga-hilir>
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Smart Media.
- UNICEF, WHO, & World Bank Group. (2019). *Levels and Trends in Child Malnutrition*. Washington DC.
- Wicaksono, I. (2021). Integration Of Development Programs Based On Collaborative Governance On Regional Policies And Village. *Politico*, 53-66.